



Masih Temukan Kasus Numpang KK di PPDB 2023

SLEMAN - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ menemukan kasus numpang KK dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 di Kota Jogja.

Kepala ORI Perwakilan DIJ Budhi Masturi mengatakan setiap tahun pihaknya selalu menerima informasi maupun laporan terkait PPDB. Ini memberikan gambaran masih terjadi upaya yang dilakukan oleh masyarakat terutama orang tua calon siswa yang itu tidak sepatutnya dilakukan.

"Oleh karena itu di awal Juni kemarin sebenarnya kami sudah mengumpulkan instansi vertikal plus instansi di daerah yang punya keterkaitan penyelenggaraan PPDB untuk menandatangani pakta integritas," ujar nyadi Kantor ORI DIJ kepada para wartawan kemarin (13/7).

Budi menyebutkan masih adanya kasus yang terjadi tentang siswa yang masuk dalam satu KK. Terdapat dua KK dengan alamat yang sama. Dan setelah dicek, sebelumnya ada sepuluh anak dalam setiap KK.

"Kemarin kami sudah ke dukcapil dan di sana ada terkonfirmasi yang kedada dalam dukcapil ada sebelas anak," ucapnya.

Budi menyebut dalam satu KK ada enam anak dan sary KK terdapat lima anak. Dan di sana, pihaknya juga mem-



TUNTUT ILMU: Dua pelajar sekolah dasar berjalan pulang melintas di kawasan Tugu Jogja, kemarin (13/7). ORI Perwakilan DIJ menemukan kasus menumpang Kartu Keluarga (KK) dalam proses PPDB tahun 2023 di Kota Jogja.

peroleh KK asal, alamat asal orang tuanya yang berada di luar ring zona sekolah.

Tak hanya itu saja, Budi juga menuturkan terkait pandangan orang tua terhadap sekolah favorit itu belum hilang. Banyak orang tua yang masih menenmpatkan sekolah tertentu sebagai sekolah favorit dan ingin anaknya sekolah disitu.

"Mereka melakukan berbagai cara agar anaknya sekolah situ," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dindikpora Kota Jogja Budi Santosa Asrori mengatakan, ke depan akan dilakukan evaluasi terkait hal tersebut. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, nantinya akan mengkoordinasikannya dengan

Disdukcapil dan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.

Untuk mengubah *mindset* orang tua atau masyarakat soal sekolah favorit. Budi menyebut itu adalah persepsi dari masyarakat sendiri. "Yang jelas pelayanan sekolah itu sama. Kami juga selalu melakukam rotasi guru agar bisa merata. Dan dari pihak pelayanan

serta bantuan itu pun juga sama semua," ungkapnya.

Terkait dugaan adanya kecurangan orang dalam untuk memasukkan siswa ke sekolah favorit. Budi mengatakan itu nanti akan dikembalikan ke ketentuan yang ada. "Ke depan kami akan melakukan perbaikan-perbaikan lagi," tegas Budi (**ayu/bah/zi**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005